

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana pengaruh anatar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab V maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

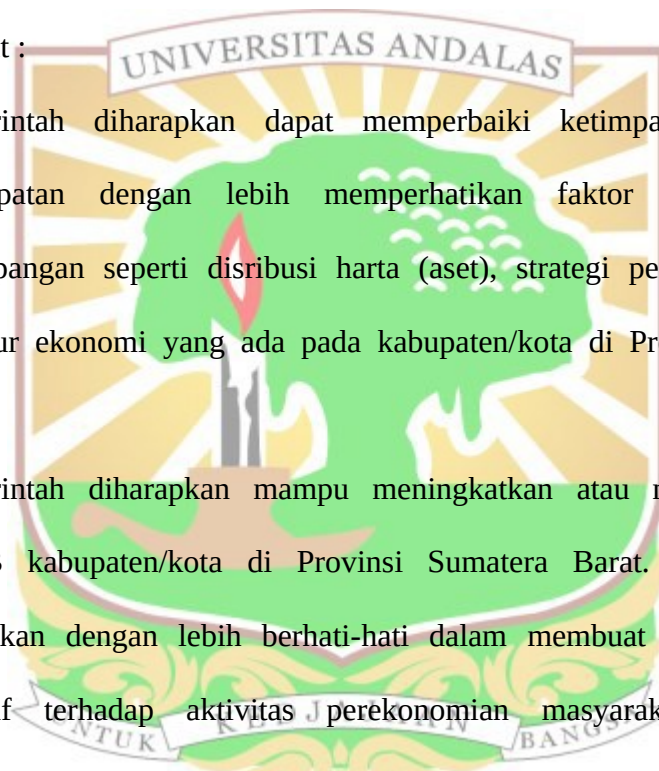
1. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi (R^2) adalah variabel independen yang terdiri dari PDRB dan IPM memperoleh angka sebesar 0.582801 atau sebesar 58,2%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 41,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2. Pengaruh variabel PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah signifikan. Hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar -0.395868 yang menandakan bahwa apabila PDRB naik sebesar 1% maka akan mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.395%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis karena semakin tinggi PDRB maka akan mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh variabel IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah signifikan. Hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0.041855 yang menandakan bahwa apabila IPM naik sebesar 1% maka akan mampu

meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.418%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis karena semakin tinggi IPM akan mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan dengan lebih memperhatikan faktor lain penyebab ketimpangan seperti distribusi harta (aset), strategi pembangunan dan struktur ekonomi yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan atau mempertahankan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang sensitif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus bisa mengenali potensi dan kelemahan masing-masing daerah. Karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang apabila dikenali dan kreatif dikembangkan, maka akan menjadi nilai tambah bagi daerah tersebut. Contohnya seperti daerah yang memiliki sektor berbasis pertanian, jika pemerintah cermat dalam mengenali potensi daerahnya, maka sektor pertanian ini dapat dijadikan sebagai agro industri maupun agrowisata



yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih dan hal ini akan berdampak terjadi pemerataan distribusi pendapatan.

3. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi masalah kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun angka usia harapan hidup kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tergolong tinggi, akan tetapi masih ada komponen lain dalam membentuk IPM, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat. Program-program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan IPM, sebaiknya ditinjau ulang apakah sudah tepat sasaran atau belum. Upaya peningkatan IPM sebaiknya difokuskan pada masyarakat dan daerah-daerah yang lebih membutuhkan dan tepat sasaran . Agar hal ini dapat mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

